

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar belakang

Menurut sensus penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Nasional pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.641.326 orang yang membuat Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk tertinggi ke 4 di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Maka pemerintah memaksimalkan program KB yang selama ini dijalankan oleh BKKBN dalam menekan jumlah penduduk. Peran BKKBN sangatlah penting sekali sebagai suatu instansi pemerintah yang menangani masalah jumlah kependudukan. BKKBN sebagai suatu instansi/lembaga yang berperan dilingkup propinsi dan di setiap desa, BKKBN dibantu oleh petugas lapangan KB yang di sebut PLKB.

Tugas pokok PLKB adalah melakukan penyuluhan keluarga berencana nasional dan pelayanan keluarga berencana (berdasarkan Kepmenpan Nomor. 120 Tahun 2004 Pasal 3 dan Pasal 4). Memasuki era baru pembangunan pelaksanaan KB saat ini, banyak sekali tuntutan perubahan yang harus dilakukan terkait dengan pelaksanaan program KB di tingkat desa/kelurahan, baik yang muncul akibat dari adanya perubahan visi dan misi program yang ada maupun tuntutan perubahan dari pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan UU No.22 tahun 1990 tentang otonomi daerah.

Visi dari BKKBN yaitu Mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang dan Misi BKKBN yaitu Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera,

sumber : bkkbn.go.id/profile

Pelaksanaan program KB tidak lagi semata mata diarahkan hanya kepada upaya pencapaian target kuantitas penduduknya, melainkan jauh lebih luas lagi sudah harus menyentuh banyak aspek terkait dengan upaya kualitas dalam rangka mewujudkan sebuah keluarga yang berkualitas.

Dari pelaksanaan program KB diharapkan sudah tidak lagi terlalu banyak intervensi dari tingkat atas, sudah saatnya lebih banyak lagi digali dan di

rumuskan inisiatif dan aspiratif yang muncul berdasarkan kebutuhan dari masyarakat.

Pelatihan yang diadakan oleh Balai Pelatihan dan Pengembangan BKKBN disesuaikan atas kebutuhan, baik kebutuhan dari instansi maupun dari masyarakat. Pelatihan menurut Mathis (2002:22) adalah “Suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu dalam mencapai tujuan organisasi”. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Terkadang ada batasan yang ditarik antara pelatihan dengan pengembangan, dengan pengembangan yang bersifat lebih luas dalam cakupan serta memfokuskan pada individu untuk mencapai kemampuan baru yang berguna baik bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa mendatang. Sedangkan Simanjuntak (2005) mendefinisikan “Pelatihan merupakan bagian dari investasi SDM (human investment) untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja dan dengan demikian meningkatkan kinerja pegawai”. Pelatihan biasanya dilakukan dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan, diberikan dalam waktu yang relatif pendek untuk membekali seseorang dengan keterampilan kerja.

Pelatihan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pelatihan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. Karyawan, baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya.

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) adalah lembaga negara yang bertugas mengurus masalah kependudukan secara nasional. Ada beberapa bidang di dalamnya, salah satu bidangnya yaitu bidang pelatihan

dan pengembangan. Bidang tersebut berfungsi sebagai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan program KB (Keluarga Berencana) Nasional serta pembangunan keluarga sejahtera.

PLKB sebagai petugas yang mempunyai kedudukan di tingkat desa/kelurahan, adalah merupakan petugas strategis yang diharapkan mampu menjawab dan membawa perubahan pada masyarakat. Melalui PLKB, semua gagasan baru KB bisa disampaikan kepada masyarakat, dan semua potensi masyarakat bisa digali, dan melalui PLKB pula, pada akhirnya partisipasi masyarakat dalam program KB bisa berjalan dengan maksimal dan ditingkatkan. Melalui pelatihan ini, PLKB dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan visi misi BKKBN.

Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Jawa Barat jumlah peserta KB aktif pada 2009 sebanyak 6,4 juta orang dan jumlah peserta keluarga berencana aktif 2010 mencapai 6,77 juta orang. Terlihat ada peningkatan, walaupun demikian, BKKBN terus meningkatkan dan mengembangkan program KB. Salah satunya dengan melaksanakan Pelatihan Refreshing untuk PLKB.

Pelatihan Refreshing diperuntukan untuk PLKB di tingkat Provinsi Jawa Barat agar maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga di masyarakat. Peserta Pelatihan Refreshing yaitu PLKB yang sudah pernah mengikuti kegiatan Pelatihan Refreshing sebelumnya dan yang baru.

B . Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi, diantaranya yaitu :

1. Peserta Pelatihan Refreshing adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang penyuluhan KB atau biasa disebut Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang sudah pernah mengikuti pelatihan akan tetapi kinerja di lapangan menurun dan kurang sesuai dengan visi dan misi dari BKKBN.

2. Peserta Pelatihan Refreshing berjumlah 31 orang dan berasal dari beberapa kabupaten dan kota se-Jawa Barat yang belum pernah mengikuti Pelatihan Refreshing sebelumnya.
3. Dari 31 peserta pelatihan, yang mendapatkan nilai diatas 60,00 dalam pre-test yaitu sebesar 22,5% yang berjumlah 7 orang.
4. PLKB kurang mengembangkan program KB sesuai dengan potensi yang diampu di desanya.
5. Dengan diadakannya Pelatihan Refreshing bagi PLKB akan mampu dalam mengemban tugas di lingkungan kerjanya masing-masing sehingga penyampaian dari program KB bisa tersampaikan dengan maksimal.

Dari hasil identifikasi masalah tersebut agar penelitian terfokus maka peneliti membatasi masalah hanya pada upaya widyaiswara dalam meningkatkan kinerja PLKB di Balai Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Jawa Barat, oleh karena itu masalah dibatasi pada:

1. Bagaimana upaya widyaiswara dalam merencanakan pelatihan refreshing untuk meningkatkan kinerja PLKB di Balai Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Bandung ?
2. Bagaimana upaya widyaiswara dalam melaksanakan pelatihan refreshing untuk meningkatkan kinerja PLKB di Balai Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Bandung ?
3. Bagaimana upaya widyaiswara dalam mengevaluasi pelatihan refreshing untuk meningkatkan kinerja PLKB di Balai Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Bandung ?

C . Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Widyaiswara dalam merencanakan pelatihan refreshing guna meningkatkan kinerja PLKB di Balai Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Bandung.

2. Untuk mengetahui upaya Widyaiswara dalam melaksanakan pelatihan refreshing guna meningkatkan kinerja PLKB di Balai Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya Widyaiswara dalam mengevaluasi pelatihan refreshing guna meningkatkan kinerja PLKB di Balai Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Bandung.

D . Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan kontribusi positif baik secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi untuk dijadikan sebagai landasan teori bagi BKKBN dalam mengembangkan berbagai pelatihan yang akan diadakan.

2. Secara Praktis

Menambah ilmu, wawasan dan pengalaman praktis bagi penulis khususnya mengenai pelatihan PLKB di Balai Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Provinsi Jawa Barat

E . Struktur Organisasi Skripsi

BAB I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Struktur Organisasi Penulisan.

BAB II Kajian Pustaka Kajian Pustaka, di dalamnya terdapat beberapa teori dan konsep yang berhubungan dengan judul dan permasalahan penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian, Membahas tentang Lokasi dan Subjek Penelitian, Desain Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Operasional, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data serta Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri atas Kondisi Objektif Pelatihan Refreshing Di Balai Pelatihan Dan Pengembangan BKKBN Jawa Barat, Hasil Penelitian, dan Analisis Hasil Penelitian

BAB V Kesimpulan dan Saran terdiri dari Hasil Simpulan yang didapat dari penelitian dan Saran yang dapat digunakan oleh para peneliti lain.